

ABSTRAK

Perubahan perkembangan tata kelola pemerintah daerah ditandai dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang bertujuan agar setiap daerah dapat mandiri dalam melakukan pembangunan daerahnya dalam bentuk belanja modal yang berguna untuk menambah aset tetap daerah. Sampel penelitian ini menggunakan 40 kota/kabupaten yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam membuat kebijakan publik terutama berkaitan dengan belanja modal

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.



ABSTRACT

Changes in the development of local governance is characterized by the presence of local autonomy and fiscal decentralization, which have purpose to make every region becomes independent in conducting their regional development in the form of capital expenditure that is useful to increase the fixed assets of region. Sample of the research is using the 40 cities/districts in the province of Special Region Yogyakarta and Central Java. Regression analysis results show that the General Allocation Fund and Special Allocation Fund have significant positive effect on capital spending, while the variable of Total Population has no significant effect on capital expenditure. Thus the local government is expected to consider the General Allocation Fund and Special Allocation Fund in making public policy mainly related to capital expenditures.

Keywords: General Allocation Fund, Population, Special Allocation Fund, and Capital Expenditure.

